

**THE IMPACT OF THE POLICY OF NATIONAL COMMUNITY
EMPOWERMENT PROGRAM SELF-SUFFICIENT RURAL COMMUNITY
LIVELIHOOD IMPROVEMENT IN THE VILLAGE OF PASLATEN SUB-
DISTRICT OF REMBOKEN**

OLEH:

**FADILA DJAMI
ALDEN LALOMA
VERY Y. LONDA**

Abstract : Government policies to improve the livelihood of the community improvement in poverty reduction to date continues to be carried out, even a variety of programs have been proposed by the Government to reduce the gap between the rich and the poor. In connection with the program, the Government of Indonesia mencenankan National Community Empowerment Program Self-sustaining Rural with inside are program development and infrastructure programs and Save Loan women who become the focus in this research.

Aiming to find out the impact of the policy of National Community Empowerment Program Self-sufficient Rural Community Livelihood improvement in the village of Paslaten sub-district of Remboken. The researchers used a qualitative method, infoman in this study amounted to 9 people. Instruments and data collection Techniques are in use are guidelines for interviews and help with interviews and observation.

Keyword: impact pnpm, standard of living

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perbaikan taraf hidup masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan hingga saat ini terus dilaksanakan, bahkan berbagai program telah dicetuskan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya, dan yang miskin.

Dalam kaitannya dengan program tersebut pemerintah Indonesia mencenankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan program. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di harapkan menjadi suatu saluran perbaikan taraf hidup masyarakat Mengingat bahwa ini adalah salah satu kebijakan yang di buat pemerintah dengan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat karena dalam setiap kepengurusan dan

keberlangsungan Mengingat bahwa ini adalah salah satu kebijakan yang di buat pemerintah dengan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat karena dalam setiap kepengurusan dan keberlangsungan program ini masyarakat sendirilah yang mengelolanya.

Program simpan pinjam perempuan yang merupakan fokus dalam penelitian ini menjadi kajian yang sangat menarik karena program tersebut memberi dampak yang sangat besar terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat Memperhatikan fenomena di atas peneliti lebih melihat pada dampak kebijakan yang ditimbulkan dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada perbaikan taraf hidup masyarakat di Desa Paslaten Kecamatan Remboken. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik

memilih judul penelitian “ Dampak Kebijakan PNPM mandiri Perdesaan pada perbaikan taraf hidup masyarakat di Desa Paslaten Kecamatan Remboken.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009: 18): Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Taraf Hidup

Dalam pengertian umumnya taraf hidup adalah suatu konsep yang menunjukkan nilai atau prestasi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut konsep ini, taraf hidup seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) akan nampak dari tinggi rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu

indikator utama yang dipakai untuk mengukur taraf hidup ialah mengukur besaran tingkat pendapatan (income). Namun taraf hidup tidaklah semata-mata hanya diukur dari indikator ekonomi, melainkan juga dapat diukur dari indikator-indikator lainnya, antara lain adalah indikator sosial. pengukuran dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia (*basic need*). Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar/pokok ini meliputi : (1) makanan, nutrial, lapangan kerja (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) komunikasi, (6) kebudayaan, (7) penelitian dan teknologi, (8) energi, (9) hukum, dan (10) dinamika politis dan implikasi idiologi (Soejatmoko, dalam Tjokoarmidjojo, 1984).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Bidang Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

1. Tujuan umum dan Ketentuan Dasar
 - a. Tujuan Umum SPP

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

- b. Tujuan Khusus SPP
 1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
 3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
- 2. Ketentuan Dasar
 - a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
 - b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman.
 - c. Keberdayaan, artinya proses pengolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
 - d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
 - e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2. Sasaran dan Bentuk Kegiatan SPP
 - a. Sasaran Program

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan bagaimana Dampak kebijakan PNPM mandiri perdesaan pada perbaikan taraf hidup masyarakat di Desa Paslaten Kecamatan Remboken.

Fokus dalam penelitian ini ada pada Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Perbaikan Taraf Hidup masyarakat dengan menggunakan beberapa kriteria dalam menentukan tingkat kesejahteraan atau taraf hidup yaitu: Lapangan Pekerjaan, Pendapatan, Pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Perbaikan taraf

hidup di Desa Paslaten Kecamatan Remboken. Khususnya (Simpan pinjam perempuan)

Lapangan Pekerjaan

Dampak yang di timbulkan dari program simpan pinjam perempuan adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang nyata sehingga dapat di katakan ada perbaikan taraf hidup pada masyarakat di Desa Paslaten. Walaupun kecil pendapatan yang mereka dapatkan dari usaha usaha tersebut tetapi intinya masyarakat sudah dapat bekerja. Tentunya ada perbedaan antara masyarakat yang tidak bekerja dan sudah bekerja, artinya masyarakat yang tidak bekerja memperbaiki taraf hidupnya dengan bekerja. Kesimpulannya Dampak dari suatu kebijakan / program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus di selaraskan. Dan hasilnya adalah apakah program itu berhasil sesuai dengan program apa yang di jalankan dengan melihat kebutuhan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat di Desa paslaten adalah ingin mendapatkan pekerjaan dan program simpan pinjam perempuan memberikan bantuan modal usaha sehingga kebutuhan mereka tercukupi dengan membuka usaha tersebut.

Pendapatan

Dari segi pendapatan sebagian besar mengatakan bahwa belum dapat di katakan meningkat karena setiap masyarakat memiliki pendapatan dan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan usaha apa yang mereka buka dan seberapa besar penghasilannya mereka. Ketika program simpan pinjam di jalankan

tentunya bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya program ini tidak bisa di katakan berhasil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena sesuai dengan hasil wawancara bahwa penambahan modal usaha yang mereka dapatkan hanya dapat membantu kebutuhan keluarga sehari - hari itu pun kecil, memang mereka dapat membuka usaha tetapi sebagian besar hanya dapat membuka usaha yang kecil sesuai dengan pinjaman yang mereka dapatkan.

Pendidikan

Berbicara mengenai dampak suatu kebijakan / program yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan suatu Pendidikan yang harus terpenuhi karena pendidikan merupakan satu indikator penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. pendidikan adalah hal yang utama, apalagi bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan dengan ini pemerintah sudah banyak mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan bebas mendapatkan Beasiswa atau biaya pendidikan sampai lulus. Mayoritas Di berbagai Desa – desa termasuk Desa Paslaten mulai dari SD, SMP, SMA dan Unniversitas sudah mendapatkan beasiswa tersebut anak- anak sudah tidak putus sekolah lagi berkat bantuan beasiswa ini. Ini adalah contoh dari suatu kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, “Nah, dalam hal suatu kebijakan / program simpan pinjam perempuan dalam mencapai sasaran sesuai dengan

kebutuhan masyarakat di Desa Paslaten berdasarkan dengan wawancara sebagian besar mengatakan dalam biaya pendidikan keluarga mereka rata – rata tidak di ambil dari dana pinjaman SPP kecuali hanya berupa fasilitas seperti buku, pensil, dan lainnya karena biaya pendidikan yang sudah gratis. Sehingga dapat dikatakan bahwa program simpan pinjam perempuan hanya sekedar bantuan tapi tidak dapat memperbaiki taraf hidup karena program ini tidak besar seperti program pemerintah yang memberikan beasiswa, yang dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian terdapat Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Perbaikan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Paslaten Kecamatan Remboken.

1. Lapangan Pekerjaan

Terdapat dampak perbaikan taraf hidup masyarakat pada indikator lapangan pekerjaan, karena dengan adanya Program Simpan pinjam perempuan dapat membantu masyarakat yang tidak bekerja mendapatkan pekerjaan dengan penambahan modal untuk membuka usaha sendiri.

2. Pendapatan

Belum terlihat dampak perbaikan taraf hidup masyarakat pada indikator ini karena masyarakat yang mendapatkan pinjaman dari simpan pinjam perempuan merasa bahwa bantuan ini tidak dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka, melainkan hanya bisa membantu kebutuhan sehari – hari dengan pinjaman

yang kecil tentu tidak dapat memperbaiki pendapatan keluarga masyarakat Desa Paslaten.

3. Pendidikan

Belum juga terlihat dampak perbaikan taraf hidup masyarakat pada indikator pendidikan, karena program simpan pinjam perempuan tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan keluarga masyarakat di desa paslaten, berdasarkan dana pinjaman yang di dapatkan kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo, 2008, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Anonimous, 1993, *Peluang dan Tantangan Ekspor Produk Perikanan Indonesia di Pasar Internasional pada era PJPT II*, Yogyakarta: University Club UGM.

Budiman N, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dunn W, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Eliyati, 2012, *Upaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*, Fakultas ilmu dakwah dan komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Fedrik Litaniawan, 2014, *Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Mouton* Jurusan Administrasi Fisip Universitas Patjajaran.
- Indiahono D, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Djogjakarta : Gava media.
- Islamy I, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Askara.
- Jones C. O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ismanto R. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kartono, 2002, *Patologi Sosial 3 "Gangguan – Gangguan Kejiwaan"* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lutfhi J. K dan M. Lutfi, 2012, *Perihal Negara Hukum & Kebijakan Publik*, Malang : Setara Press.
- Lubis M. S, 2007, *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljarto dan Prabowo S, 1997, *Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Sosial*. Jakarta: Jurnal CSIS.
- Nugroho R, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho R, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi dan Implementasi Formulasi*, Jakarta: PT Alex Komputindo.
- Subarsono AG, 2012, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeprapto, 2000, *Evaluasi Kebijakan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sayogyo, 1978, *Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Perdesaan Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo B, 1984, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Tomi Razalie, 2013, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara* Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara.
- Wibawa S, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Winarno B, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Winarno B, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Jogjakarta: Media Pressindo.
- Winarno B, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, proses, dan studi kasus komparatif)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wahab, 2008, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Sumber Lain:
Buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan

*Masyarakat (PNPM) Mandiri, Edisi
Juli 2007.*

*Buku Petunjuk Teknis Optimalisasi
Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan. Edisi Mei 2010.*

*Undang Undang No 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.*